

	<b>News Title :</b> Bappebti Siapkan Aturan Perpindahan Pengawasan Aset Kripto ke OJK	
	<b>Media Name :</b> kumparan.com	<b>Journalist :</b> Moh Fajri
	<b>Publish Date :</b> 20 January 2023	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 3,000,000
	<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 1,000,000
	<b>Section/Rubrication :</b> Bisnis	<b>Topic :</b> Pengawasan Kripto

## Bappebti Siapkan Aturan Perpindahan Pengawasan Aset Kripto ke OJK

kumparanBISNIS  20 Januari 2023 15:59 - waktu baca 2 menit  0  0  0  0



Ilustrasi aset kripto. Foto: Shutterstock

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kewenangan transisi pengalihan **aset kripto**. Penyusunan aturan itu akan dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) dan Kementerian Keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang membuat pengawasan aset kripto nantinya akan berganti dari Bappebti ke OJK.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan bahwa RPP terkait transisi ini akan disusun paling lambat selama 6 bulan.

"Butir yang akan dimasukkan dalam RPP ini terkait mekanisme pemindahan, mekanisme kerja sama dan sinergi antara Bappebti, OJK dan Kementerian Keuangan," ujar Didid saat Penutupan Raker Bappebti di Auditorium Bappebti, Jumat (20/1).

Menurutnya, OJK berperan terhadap kebijakan operasional dari aset kripto. Sementara itu, Bappebti akan mengurus koordinasi terkait kebijakan aset digital.



"Bappebti mengurus regulasi secara makro. Ilustrasinya seperti asuransi, kebijakan operasionalnya ada di OJK, tetapi kebijakan besarnya ada di Kementerian Keuangan," kata Didit.



Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di Auditorium Bappebti, Jumat (20/1/2023). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Didit menjelaskan imbas OJK yang bertugas terkait kebijakan operasional, maka ketika ada keluhan masyarakat soal operasional aset kripto bakal diurus oleh OJK. Sedangkan, masyarakat yang memiliki permasalahan mengenai kebijakan dapat langsung melaporkan ke pihaknya.

"Secara garis besar biasanya keluhan masyarakat terkait masalah operasional tentu ke OJK, lain kalau masalah kebijakan. Misalnya, kebijakan besar yang diperdagangkan aset kripto atau kripto currency itu besaran kebijakannya," terang Didit.

Didit menegaskan secara kebijakan yang diperdagangkan adalah aset kripto bukan kripto currency. Sehingga, Bappebti akan mengkaji kembali apabila masyarakat menuturkan kripto currency juga.

"Misalnya exchanger atau bursa tidak berjalan dengan baik itu kan di operasionalnya," tutur Didit.